

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM PENCEGAHAN FRAUD ATAS AUDIT  
PENGELOLAAN DANA DESA**



**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : MUHAMMAD FAHIM ZULKHORNAEN**

**NIM : 126231007**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2024**

# LAPORAN TUGAS AKHIR

## PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM PENCEGAHAN FRAUD ATAS AUDIT PENGELOLAAN DANA DESA



**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA: MUHAMMAD FAHIM ZULKHORNAEN**

**NIM: 126231007**

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT  
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN  
PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**2024**

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM PENCEGAHAN FRAUD ATAS  
AUDIT PENGELOLAAN DANA DESA**

**Laporan Tugas Akhir**

**Disusun Oleh :**

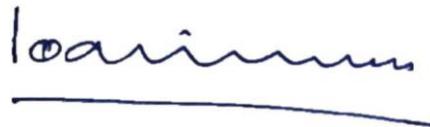


**Muhammad Fahim Zulkhornaen**

**126231007**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing**



**Prof. Dr. Sukrisno Agoes, S.E., Ak., M.M., CPA., CA**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan dana desa yang terjadi saat ini dan menganalisis loophole sehingga dapat dibuat desain pengelolaan dana desa. Desain sistem pengelolaan dana desa yang direkomendasikan bertujuan untuk memperketat kontrol internal melalui persetujuan APBDes yang didasarkan pada review dengan indikator-indikator terukur. Sistem ini dirancang untuk meminimalisasi kecurangan oleh aparat desa dengan mengintegrasikan data dan menggunakan e-katalog, yang membuat mark-up anggaran mustahil dilakukan. Otorisasi seluruh pengeluaran kas dan pembagian tanggung jawab antara bendahara desa, sekretaris, dan penerima barang/penanggung jawab kegiatan memastikan dokumen terverifikasi dengan baik. Selain itu, pelaporan dilakukan secara real-time, memanfaatkan database yang mudah diakses tanpa harus menunggu per semester.

**Kata Kunci:** Dana Desa, Fraud, Sistem Informasi Akuntansi

## ABSTRACT

*This research aims to understand the current process of village fund management and analyze loopholes to design an improved village fund management system. The recommended system design aims to strengthen internal controls by approving the APBDes based on reviews with measurable indicators. This system is designed to minimize fraud by village officials by integrating data and using an e-catalog, making budget mark-ups impossible. Authorization of all cash expenditures and the division of responsibilities between the village treasurer, secretary, and goods receiver/activity manager ensure proper document verification. Additionally, reporting is conducted in real-time, utilizing an easily accessible database without the need for semi-annual waits.*

**Keywords:** Dana Desa, Fraud, Accounting Information System

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya tugas akhir ini. Tugas akhir merupakan syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam perjalanannya, banyak bimbingan, bantuan dan dukungan yang diterima penulis dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
2. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Jamaludin Iskak, S.E., MSi., Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
4. Prof. Dr. Sukrisno Agoes, S.E., Ak., M.M., CPA, CA selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Teman-teman yang telah membantu selama perkuliahan hingga penyelesaian penulisan tugas akhir ini.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan.

Jakarta, July 2024



Muhammad Fahim  
Zulkhornaen

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>10</b>
1.1 Latar Belakang .....	10
1.2 Rumusan Masalah .....	14
1.3 Tujuan Penulisan .....	14
1.4 Manfaat Penulisan .....	14
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1 Landasan Teori .....	15
2.1.1 Dana Desa.....	15
2.1.2 <i>Financial Management Information System</i> .....	15
2.1.3 Anggaran Sektor Publik .....	17
2.1.4 Pengembangan Sistem.....	19
2.1.5 <i>Internal Control</i> .....	20
2.1.6 Audit Sektor Publik .....	20
2.1.7 E-Katalog.....	21
<b>BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>23</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	23
3.2 Subjek Penelitian .....	23
3.3 Desain Penelitian .....	23
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	25
3.5 Teknik analisis .....	25

<b>BAB 4 PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
4.1 Gambaran Sistem Pengelolaan Saat Ini.....	27
4.2 Sistem yang Diusulkan .....	30
4.2.1 Diagram Konteks.....	30
4.2.2 <i>Data Flow Diagram</i> .....	30
4.2.3 <i>Business Process Diagram</i> .....	35
4.2.4 <i>Flowchart</i> .....	36
4.2.5 <i>Entity Realtionship Diagram</i> .....	37
4.3 Analisis Sistem Usulan.....	39
<b>BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>40</b>
5.1 Simpulan.....	40
5.2 Saran .....	40
5.3 Keterbatasan Peneltian .....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN WAWANCARA .....</b>	<b>42</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Financial Management Information System .....	16
Gambar 4.1 Flowchart Penyusunan APB Desa .....	27
Gambar 4.2 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa.....	28
Gambar 4.6. Diagram Konteks .....	30
Gambar 4.7 Data Flow Diagram Level 0 .....	28
Gambar 4.8 Data Flow Diagram Level 1 Proses 2.....	28
Gambar 4.9 Data Flow Diagram Level 1 Proses 3.....	33
Gambar 4.10 Data Flow Diagram Level 1 Proses 4 .....	34
Gambar 4.11 Business Process Diagram .....	35
Gambar 4.12 Flowchart Usulan .....	36
Gambar 4.13 ER Diagram.....	36

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kasus Penyelewengan Dana Desa .....	11
Tabel 1.2 Modus Penyelewengan Dana Desa .....	11

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dana desa mulai dicanangkan pada 2015, melalui Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Desa yang awalnya hanya dianggap sebagai objek pembangunan, sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut “beralih fungsi” menjadi subjek dan ujung tombak dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan lebih untuk mengatur dan mengelola keuangannya secara mandiri, diharapkan pembangunan akan mencapai hasil yang lebih merata karena dimulai dari unit terkecil yakni desa.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa dengan adanya dana desa telah terbangun 95,2 ribu kilometer jalan desa, 914 ribu meter jembatan, sambungan air bersih sebanyak 22.616 unit serta penurunan angka kemiskinan di pedesaan dari 14,09 persen menjadi 13,93 persen. Selain itu, gini ratio di Indonesia juga turun dari 0,34 di tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2023. Peningkatan pembangunan dan penurunan tingkat kemiskinan merupakan sebuah prestasi dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat desa.

Manfaat dana desa yang besar sudah sepatutnya diapresiasi, namun dalam pengelolaannya Kementerian Keuangan mengakui masih adanya kendala baik dalam penyaluran maupun penggunaan dana desa. Kendala yang terjadi antara lain adalah tata cara perhitungan dana desa yang belum sesuai ketentuan, laporan realisasi yang belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, penggunaan dana desa yang diluar prioritas, pemerintahan di desa yang belum mengenal mekanisme uang persediaan, serta pemungutan dan penyeteroran pajak yang belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada.

Dilaporkan sekitar 10.000 aduan dari masyarakat tentang dugaan penyelewengan dana desa telah diterima oleh satuan tugas dana desa, dan penyelewengan ini apabila terbukti, berpotensi menyebabkan kerugian negara. Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi, dana desa yang dikorupsi atau diselewengkan sudah merugikan negara dalam jumlah yang tidak sedikit. Kerugian negara pada tahun 2015 mencapai Rp 9,12 miliar, tahun 2016

mencapai Rp 8,33 miliar, dan pada tahun 2017 mencapai lonjakan cukup besar, yakni sejumlah Rp 30,11 miliar. Jumlah tersebut setara dengan alokasi dana desa di APBN untuk 77 desa. Berikut merupakan beberapa kasus yang telah masuk ke ranah pengadilan :

**Tabel 1.1 Kasus Penyelewengan Dana Desa**

No	Kasus	Sumber
1.	Korupsi Dana Desa, Mantan Keuchik di Aceh Utara Divonis 4 Tahun Penjara	Ajnn.Net Juli 2023
2.	Kepala Desa di Labuhan Tangga Kec. Bangko Kab. Rohil menggelapkan 399 juta yang digunakan untuk keperluan pribadi, pajak tidak disetor.	Detik.com (2017) diakses 14 September 2018
3	Kepala Desa Bunder, Kecamatan Patuk, Kabul Santosa memasukkan dana desa ke rekening pribadi	Kompas (2017) diakses 14 September 2018
4	Kepala Desa Banjarsari melakukan korupsi dengan cara membuat proyek fiktif, namun tidak ada satupun yang dilaksanakan	Detik.com (2017) diakses 14 September 2018
5	Aparatur Sipil Negara Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan memotong anggaran dana desa senilai 15 juta rupiah dari 277 desa dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk membayar pajak	Kompas Regional (2017) diakses 14 September 2018
6	Korupsi Kas Desa Rp 52 Juta, Kades Sidoarjo Diserahkan ke Kejaksaan	news.detik.com (2018) diakses 27 Marert 2019

Berdasarkan pemantauan ICW, disebutkan bahwa dalam tiga tahun, mulai tahun 2015 hingga semester 1 tahun 2018, terdapat 154 kasus penyelewengan dana desa. Terdapat 12 modus yang sering digunakan dalam kasus korupsi dana desa menurut ICW yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Modus Penyelewengan Dana Desa**

No	Modus Penyelewengan Dana Desa
1.	Membuat rancangan anggaran biaya diatas harga pasar
2.	Mempertanggungjawabkan pembiayaan pembangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut berasal dari sumber lain
3.	Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan
4.	Pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten

5.	Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa dan jajarannya.
6.	Penggelembungan ( <i>mark up</i> ) pembayaran honorarium perangkat desa.
7.	Penggelembungan ( <i>mark up</i> ) pembayaran alat tulis kantor.
8.	Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak.
9.	Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun peruntukkan secara pribadi.
10.	Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa
11.	Melakukan permainan ( <i>kongkalingkong</i> ) dalam proyek yang didanai dana desa.
12.	Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.

Sumber : *Indonesia Corruption Watch (ICW)*

Dwi Febri Arifiyanto (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa hasil dari pembangunan disukai dan disambut positif oleh masyarakat, sehingga sepatutnya program dana desa harus terus bergulir namun manajemen pengelolaan dana desa dan transparansi masih menjadi permasalahan dan harus dibenahi. Terdapat kesalahan dalam mekanisme pengelolaan, penyaluran dan penggunaan dana desa yang tidak mengedepankan prinsip internal control yang baik sehingga masih rawan penyelewengan, celah yang diciptakan dalam pengelolaan dana desa seharusnya dapat menjadi alat untuk meminimalisasi risiko penyelewengan. Wijayanti dan Hanafi (2018, 343) dalam penelitiannya juga mendukung dan menunjukkan bahwa efektivitas internal control menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan fraud dalam keuangan desa.

BPKP pada tahun 2015 telah menciptakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang bertujuan untuk memudahkan pelaporan keuangan desa dan meminimalisasi kecurangan yang terjadi dalam alokasi dana desa. Pada Desember 2018, BPKP dan Kementerian Dalam Negeri telah mengklaim bahwa sudah 93% desa atau pada 95% kabupaten/kota telah mendapatkan dana desa, namun temuan kasus korupsi yang terjadi membuktikan bahwa masih ada yang salah dalam manajemen dana desa.

Masalah inilah yang perlu diperbaiki sehingga nantinya manajemen pengelolaan dana desa menjadi lebih transparan dan akuntabel. Diharapkan manajemen dana desa juga

dapat mengintegrasikan sistem pengelolaan dana desa dengan data-data lain dan dapat mengukur output serta outcome yang tercipta sehingga diharapkan dana desa menjadi program yang dapat membawa Indonesia maju dari desa.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah bagaimana rekomendasi desain sistem pengelolaan dana desa yang diperlukan untuk memperketat *internal control* dalam sistem tata kelola dana desa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah yaitu untuk menghasilkan sistem pengelolaan dana desa yang dapat memaksimalkan *internal control* yang ada serta dapat mengintegrasikan sistem pengelolaan dana desa.

## **1.1 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penulisan ini diuraikan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penulisan ini dapat menjadi literatur atau referensi dalam melakukan penulisan selanjutnya dan juga memberikan pemahaman baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia khususnya mengenai sistem pengelolaan dana desa.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penulisan ini diharapkan akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah dan pihak terkait dalam pengelola sistem dana desa untuk membuat sistem yang efektif dan efisien tanpa meninggalkan aspek *internal control* dalam pelaksanaannya sehingga akan meminimalisasi penyelewengan dana desa dan mengurangi kerugian negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, D.F. and Kurrohman, T., 2014. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), pp.473-485.
- Ismail, M., dkk. 2016. Sistem Akutansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2).
- Khoiriah, S. and Meylina, U., 2017. Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), pp.20-29.
- Laudon, K.C. and Laudon, J.P., 2015. *Management Information Systems: Managing the Digital Firm Plus MyMISLab with Pearson eText--Access Card Package*. Prentice Hall Press.
- Moeller, R.R., 2005. *Brink's modern internal auditing*. John Wiley & Sons. Incorporated.
- Nightisabha, I. A., Suhardjanto, D., & Cahya, B. T. (2009). Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pemerintah Kota YOGYAKARTA Terhadap Implementasi Sistem E Procurement. *Jurnal Fakultas Hukum UII*, 13(2).
- Tangkaroro, K.L., Ilat, V. and Wokas, H., 2017. Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2).
- Wijayanti, P. and Hanafi, R., 2018. PENCEGAHAN FRAUD DI PEMERINTAH DESA. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2).
- Peraturan Perundang-Undangan  
Undang-Undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa  
Undang-Undang no. 15 tahun 2006 tentang Badan Pengawas Keuangan
- Website  
worldbank.com  
detik.com  
kompas.com  
<http://www.berdesa.com/12-modus-korupsi-dana-desa-versi-icw/>